

**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN UKURAN KANTOR
AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN
PENGUNGKAPAN TRANSAKSI BERELASI BERDASARKAN PSAK NO
7 TENTANG PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK BERELASI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



oleh :
Vania Nur Annisa Harijanto
14812144011

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2018**

PERSETUJUAN

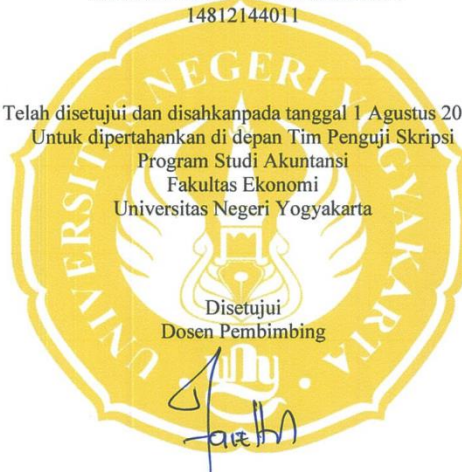
**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN UKURAN KANTOR
AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN
PENGUNGKAPAN TRANSAKSI BERELASI BERDASARKAN PSAK NO
7 TENTANG PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK BERELASI**

SKRIPSI

oleh:

VANIA NUR ANNISA HARIJANTO
14812144011

Telah disetujui dan disahkan pada tanggal 1 Agustus 2018
Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta



Disetujui
Dosen Pembimbing

Dr. Ratna Candra Sari, SE., M.Si, Akt.
NIP. 197610082008012014

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN UKURAN KANTOR
AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN
PENGUNGKAPAN TRANSAKSI BERELASI BERDASARKAN PSAK NO
7 TENTANG PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK BERELASI**

oleh:

VANIA NUR ANNISA HARIJANTO
14812144011

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 23 Agustus 2018
dan dinyatakan lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dhyah Setyorini, M.Si., Ak	Ketua Penguji		24 Agustus 2018
Dr. Ratna Candra Sari, SE., M.Si, Akt.	Sekretaris		24 Agustus 2018
Adeng Pustikaningsih, S.E., M.Si.	Penguji Utama		24 Agustus 2018

Yogyakarta,29 Agustus..... 2018
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,



Dr. Sugiharsono, M.Si.
NIP. 19550328 198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vania Nur Annisa Harijanto
NIM : 14812144011
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN
UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN
TRANSAKSI BERELASI BERDASARKAN PSAK NO
7 TENTANG PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK
BERELASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, 1 Agustus 2018
Penulis



Vania Nur Annisa Harijanto
NIM. 14812144011

**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN UKURAN KANTOR
AKUNTAN PUBLIK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN
PENGUNGKAPAN TRANSAKSI BERELASI BERDASARKAN PSAK NO
7 TENTANG PENGUNGKAPAN PIHAK-PIHAK BERELASI**

Oleh:

VANIA NUR ANNISA HARIJANTO
14812144011

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh (1) struktur kepemilikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi dan (2) pengaruh ukuran KAP terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan sektor utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 52 sampel. Data yang digunakan berupa laporan keuangan yang didapatkan dari <http://www.idx.co.id> dan sumber lain yang relevan. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji linearitas. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) struktur kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi dan (2) ukuran KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi.

Kata kunci: Struktur Kepemilikan, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi

**THE EFFECT OF OWNERSHIP STRUCTURE AND PUBLIC
ACCOUNTANT FIRM SIZE ON THE LEVEL OF RELATED PARTY
TRANSACTIONS DISCLOSURE BASED ON STATEMENT OF FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARD 7 CONCERNING DISCLOSURE OF RELATED
PARTIES**

by:

VANIA NUR ANNISA HARIJANTO
14812144011

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of (1) ownership structure on the level of related party transactions disclosure based on statement of Financial Accounting Standard 7 concerning disclosure of related parties and (2) public accountant firm size on the level of related party transactions disclosure based on statement of Financial Accounting Standard 7 concerning disclosure of related parties.

This research used a quantitative method. The population in this study were major sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016. The number of samples in this study were 52 samples. The data used in the form of financial statements obtained from <http://www.idx.co.id> and other relevant sources. The classic assumption test includes normality test, multicollinearity test, heterosecurity test, and linearity test. The hypothesis test used is simple regression analysis and multiple regression analysis.

The results showed that (1) ownership structure does not significantly influence the level of related party transactions disclosure based on statement of Financial Accounting Standard 7 concerning disclosure of related parties and (2) public accountant firm size has a positive and significant effect on the level of related party transactions disclosure based on statement of Financial Accounting Standard 7 concerning disclosure of related parties.

Keyword: *ownership structure, public accounting firm size, related party transaction disclosure level.*

MOTO

“You can do anything if you have the will.” (Alfonsus Aditya)

“Ad astra per aspera.” (Kansas)

“No retread, no surrender.” (The Book of Life)

*“Setiap kamu merasa beruntung, percayalah doa ibumu telah didengar.”
(Unknown)*

“Menuju tak terbatas dan melampauinya.” (Buzz Lightyer)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Djoko Harijanto dan Kustiana, orang tua terhebat versi saya.

Terimakasih atas doa dan pengorbanan (yang mungkin banyak yang saya tidak tahu) yang telah kalian lakukan, serta kesempatan kuliah dan fasilitas yang telah diberikan sejak saya mendaftar hingga menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini.

My brother.

Bapak Waspada, Mama Kurwanti, dan Dian Wanda Prihandini,
terimakasih atas doa dan dukungannya.

Keluarga Kebonagung dan Keluarga Blitar yang telah mendukung dan mendoakan untuk kelancaran studi saya, terutama untuk tante Catur Wasono Wati yang tidak bosan untuk selalu mengingatkan agar tidak terlambat datang ke kampus (terutama kelas pagi) dan mendampingi selama berada di rumah kost.

Keluarga AWR, keluarga kecil yang dikepalai oleh Ahmad Wirasto dengan bos kecil Rava Panji Xavier. Tanpa kalian *my last* 11 SKS akan jadi B *a*ja.

Tegar Galang Anantha, sahabat pertama sejak membayar UKT 2014.

Dita dan Ulfa, rekan seperjuangan dikala OSPEK, awal kuliah.

GBH (Denny Ariza Nugraha, Rr. Nur Antari Wijayanti, Emy Pavitasari, Navi Astuti) yang awalnya Grup Bertahan Hidup, kemudian berubah menjadi Grup Bebek Hangat, dan kini Grup Babi Hangat, apapun itu, terimakasih atas kebersamaan dan kerjasamanya selama menjalani studi di Akuntansi UNY. Tanpa kalian aku tidak akan sampai pada titik ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi berdasarkan Psak No 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi” dengan lancar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. RR. Indah Mustikawati, M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Dr. Denies Priantinah, M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Dr. Ratna Candra Sari, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir Skripsi yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, kritik dan saran, serta arahan yang membangun selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi.

6. Segenap dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
7. Segenap karyawan Universitas Negeri Yogyakarta yang telah membantu kelancaran kegiatan akademik maupun non akademik.
8. Teman-teman Prodi Akuntansi, dan khususnya Akuntansi B 2014 yang telah banyak membantu selama proses studi.
9. Rocky Putra Wibowo dan Ardhana Reswari Hasna Pratista, selaku rekan kerja dalam proses pengerjaan Tugas Akhir Skripsi dengan tema Transaksi Pihak Berelasi.
10. Zahra Tiara Rusyda dan Sri Haryani yang telah memberikan inspirasi dalam meneliti laporan keuangan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, dukungan, dan bantuan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan guna menyempurnakan Tugas Akhir Skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat semua pihak.

Yogyakarta, 1 Agustus 2018
Penulis

Vania Nur Annisa Harijanto

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Perumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	10
A. Kajian Teori	10
B. Penelitian yang Relevan	22
C. Kerangka Berpikir	23
D. Paradigma Penelitian	25
E. Hipotesis Penelitian	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Desain Penelitian	27
B. Waktu Penelitian	27

C. Populasi.....	28
D. Sampel.....	28
E. Definisi Operasional.....	29
F. Metode Pengumpulan Data	33
G. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Deskripsi Data Penelitian	37
B. Hasil Analisis Statistik Deskriptif	39
C. Hasil Uji Asumsi Klasik	41
D. Hasil Uji Hipotesis	44
E. Pembahasan Hasil Penelitian	48
F. Keterbatasan Penelitian	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Perusahaan Sektor Utama BEI	38
2. Hasil Seleksi Sampel.....	38
3. Statistik Deskriptif Transaksi Pihak Berelasi	39
4. Statistik Deskriptif Struktur Kepemilikan	40
5. Statistik Deskriptif Ukuran KAP	40
6. Hasil Uji Normalitas	41
7. Hasil Uji Multikolinearitas.....	42
8. Hasil Uji Heteroskedastisitas	43
9. Hasil Uji Linearitas	43
10. Hasil Pengujian Hipotesis	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Paradigma Penelitian.....	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Sampel	62
2. Instrumen Penelitian Variabel Y.....	63
3. PSAK No. 7.....	64
4. Hasil Uji Normalitas.....	67
5. Hasil Uji Multikolinearitas.....	67
6. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	68
7. Hasil Uji Linearitas.....	68
8. Hasil Uji Hipotesis.....	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan yang merupakan salah satu entitas ekonomi tentunya membutuhkan dana untuk melakukan ekspansi perusahaan. Perusahaan akan melakukan *go public* agar dapat mendapatkan tambahan dana melalui investasi. *Go public* atau sering disebut juga penawaran umum adalah kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat (publik). Perusahaan tersebut akan tercatat di bursa menjadi perusahaan publik atau terbuka jika menawarkan saham kepada publik. Jain (2003) dalam Silviana (2012) menemukan bahwa perusahaan yang memutuskan *go public* berada dalam fase awal pertumbuhan dan berada di lingkungan industri yang sedang mengalami pertumbuhan cepat. Umumnya, dana yang tersedia didalam perusahaan tidak mencukupi guna merealisasikan potensi pertumbuhan yang dimiliki, sehingga perusahaan memutuskan *go public* untuk mendapatkan tambahan dana dari investor. Perusahaan-perusahaan yang telah *go public* dan telah tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tersebut terbagi dalam sembilan sektor menurut Jakarta Stock Exchange Industrial Classification (JASICA). Sektor-sektor tersebut meliputi sektor pertanian; pertambangan; industri dasar dan kimia; aneka industri; industri barang konsumsi; properti, real estate dan konstruksi bangunan; infrastruktur, utilitas, dan transportasi; keuangan; dan perdagangan,

jasa dan investasi. Kepemilikan dari masing-masing perusahaan pun berbeda-beda.

Report on the Observance of Standard and Codes (ROSC) menemukan bahwa terdapat lima kategori kepemilikan di Indonesia, yaitu kepemilikan oleh keluarga dan grup, kepemilikan oleh negara (BUMN), kepemilikan bank, kepemilikan asing, dan kepemilikan secara independen bukan bagian dari grup. Price Waterhouse Cooper (PwC), sebuah perusahaan audit asal Amerika Serikat melakukan survei tentang bisnis keluarga di Indonesia. Hasilnya, lebih dari 95 persen perusahaan di Indonesia merupakan bisnis keluarga.

Kepemilikan keluarga, seperti pada penelitian Muslimin (2009), menggunakan kriteria untuk menentukan perusahaan keluarga seperti yang digunakan oleh Andres (2006), yaitu minimal 50 persen dari total saham dimiliki oleh keluarga tertentu, atau jika kurang dari 50 persen terdapat anggota keluarga yang mempunyai jabatan pada Dewan Direksi atau Dewan Komisaris perusahaan. Presentase yang sebelumnya 25 persen pada Andres (2006) diubah menjadi 50 persen. Pemilihan angka 50 persen tersebut sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia, bahwa pemegang saham perusahaan dengan jumlah 50 persen atau lebih harus dilaporkan ke bursa, sehingga pengelompokan antara perusahaan keluarga dan non keluarga dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Di Indonesia, kepemilikan keluarga dan grup mendorong terjadinya transaksi pihak berelasi. Transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan (PSAK No. 7 Tahun 2015).

Sari (2014:3) menyebutkan bahwa perusahaan memiliki tiga motivasi mengapa mereka melakukan transaksi pihak berelasi ini. Pertama, digunakan untuk meminimalkan biaya transaksi (Cook, 1977 dan Fishman dan Khanna, 1998). Kedua, digunakan untuk memanipulasi laba (Jian dan Wong, 2003; Aharony et al., 2009). Ketiga, untuk tujuan *tunneling* (Cheung et al., 2009a; Cheung et al., 2009b; Cheung et al., 2006). Motivasi kedua dan ketiga tersebut merupakan motivasi oportunistis, atau motivasi yang mementingkan diri sendiri.

Terkait dengan motivasi ketiga, yaitu tujuan *tunneling*, yang merupakan motivasi oportunistis, transaksi pihak berelasi dapat digunakan sebagai *tunnel* untuk mentransfer sumber daya keluar perusahaan, untuk kepentingan pemegang saham pengendali dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham nonpengendali. Hal tersebut merugikan salah satu pihak dan mendorong terjadinya konflik kepentingan di perusahaan, yang merupakan masalah keagenan. Konflik ini pulalah yang merupakan karakteristik dari kepemilikan grup.

Permasalahan *tunneling* tersebut sulit terdeteksi karena penegakan hukum yang rendah, sistem corporate governance yang buruk, dan disclosure yang rendah. Kaitannya dengan penegakan hukum di Indonesia, perangkat hukum di Indonesia telah berusaha untuk melindungi pemegang saham minoritas. Perlindungan tersebut dilakukan dengan adanya Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) tahun 2007, Undang-Undang Pasar Modal (UU PM), dan Peraturan Bapepam-LK. Permasalahan yang akhirnya timbul adalah upaya yang harus dilakukan untuk menempuh jalur hukum dan kepedulian

pemegang saham minoritas itu sendiri terhadap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, karena pemegang saham hanya mementingkan keuntungan jangka pendek dari aktivitas *trading* yang mereka lakukan. Terkait dengan rendahnya disclosure, masyarakat akan sulit menilai apakah perusahaan melakukan transaksi pihak berelasi untuk tujuan ekonomi atau untuk tujuan oportunis. Pengguna laporan keuangan pun juga akan sulit untuk menentukan keputusan.

Rendahnya *disclosure* yang dilakukan oleh perusahaan terkait pengungkapan transaksi berelasi membuat adanya peran auditor yang independen, kompeten, dan berkualitas, yang dapat memberikan jaminan eksternal dan objektif kepada anggota dewan dan pemegang saham bahwa laporan keuangan menunjukkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang dapat dipercaya sangatlah penting. Dalam banyak kasus, transaksi pihak berelasi ini tidak diungkapkan secara eksplisit. Jadi, auditor harus dapat memeriksa secara rinci atas transaksi tersebut. Peran auditor berkualitas yang dapat memastikan bahwa perusahaan mengungkapkan transaksi pihak berelasi yang ada dalam perusahaan mereka sangat dibutuhkan. Perusahaan akan mencari kantor akuntan publik (KAP) yang kredibilitasnya tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dimata pemakai laporan keuangan (Halim, 1997 dalam Tida, 2011). KAP yang lebih besar (*Big4*) dianggap sebagai penyedia jasa audit yang lebih mampu mempertahankan independensi daripada KAP yang lebih kecil.

Struktur kepemilikan dalam perusahaan juga dapat mempengaruhi *disclosure*. Terdapat dua bentuk umum struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia dan Asia, yaitu struktur kepemilikan tersebar dan terkonsentrasi. Pada struktur kepemilikan tersebar, pemegang saham tidak bisa mengendalikan tindakan manajemen, sedangkan pada struktur kepemilikan terkonsentrasi, pemegang saham dapat mengendalikan tindakan manajemen, atau bahkan menjadi bagian dari manajemen tersebut. Perbedaan dari kedua struktur tersebut adalah proses pengambilan keputusannya. Pemegang saham mayoritas memiliki insentif untuk melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas berkaitan dengan hal tersebut. Pemegang saham mayoritas memiliki kemampuan untuk memengaruhi proses pelaporan keuangan. Kemampuan tersebut dapat membuat pemegang saham mayoritas perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan (Silviana, 2012).

Terkait dengan *disclosure*, khususnya terkait pengungkapan transaksi pihak berelasi, pada PSAK No. 7 sendiri disebutkan mengenai pengungkapan pihak-pihak berelasi. Pernyataan ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi dan oleh transaksi dan saldo, termasuk komitmen, dengan pihak-pihak tersebut. Adanya pengungkapan transaksi berelasi yang diatur dalam PSAK No. 7 tersebut, diharapkan dapat membuat perusahaan melaporkan transaksi berelasi yang ada di perusahaannya

dalam laporan keuangan perusahaan dengan rinci, supaya memudahkan pengguna laporan keuangan dalam menilai transaksi berelasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis buat, maka penulis ingin meneliti mengenai pengungkapan transaksi berelasi, khususnya mengenai struktur kepemilikan dan ukuran KAP, kaitannya dengan kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 7 dalam penelitian dengan judul “Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Ukuran Kantor Akuntan Publik, terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi Berdasarkan PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi masalah yang timbul adalah sebagai berikut.

1. Kepemilikan keluarga dan grup yang banyak terdapat di Indonesia mengakibatkan terjadinya transaksi pihak berelasi, yang didalamnya terdapat motivasi transaksi berelasi digunakan untuk meminimalkan biaya transaksi, memanipulasi laba, dan tujuan *tunneling*.
2. Transaksi pihak berelasi tidak secara eksplisit diungkapkan, atau perusahaan melibatkan sejumlah perusahaan induk, *special purpose company*, maupun pihak ketiga. Dalam beberapa kasus, manajemen membangun jaringan yang rumit agar sulit untuk dideteksi, jadi, auditor harus dapat memeriksa secara rinci atas transaksi tersebut.

3. Rendahnya *disclosure* membuat masyarakat akan sulit menilai, apakah perusahaan melakukan transaksi pihak berelasi untuk tujuan ekonomi, atau untuk tujuan oportunistik. Pengguna laporan keuangan pun juga akan sulit untuk menentukan keputusan.
4. Struktur kepemilikan terkonsentrasi membuat pemegang saham dapat mengendalikan tindakan manajemen, atau bahkan menjadi bagian dari manajemen tersebut, akibatnya pemegang saham mayoritas memiliki kemampuan untuk memengaruhi proses pelaporan keuangan, dan pada struktur kepemilikan tersebar, kepemilikan saham publik disebuah perusahaan yang umunya hanya merupakan investor dengan kepemilikan saham dibawah 5%, atau dapat disebut dengan pemegang saham minoritas, kurang memiliki kekuatan untuk mendorong manajemen melakukan pengungkapan untuk memenuhi kebutuhan informasinya.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penelitian ini dibatasi meneliti mengenai pengaruh struktur kepemilikan dan ukuran KAP terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi.

D. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh struktur kepemilikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi?
2. Bagaimanakah pengaruh ukuran KAP terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keterkaitan antara struktur kepemilikan dan kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi.
2. Untuk mengetahui keterkaitan antara ukuran KAP dan kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Akademisi

Penelitian ini diharapkan akan semakin menambah pengetahuan akademisi, terutama akademisi akuntansi dalam mengenal dan memahami tentang transaksi pihak berelasi, dalam hal ini terkait dengan struktur

kepemilikan perusahaan dan ukuran KAP, karena penelitian mengenai transaksi pihak berelasi belum banyak diteliti.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penulisan penelitian mengenai transaksi pihak berelasi, kaitannya dengan struktur kepemilikan perusahaan dan ukuran KAP yang mengaudit perusahaan, dan penelitian lain seputar hal tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Manfaat praktis bagi perusahaan, supaya dapat menjadi refleksi dan solusi agar perusahaan melaporkan apabila di perusahaannya terdapat transaksi pihak berelasi, agar transparansi kepada pengguna laporan keuangan dan masyarakat dapat tercapai. Selain itu, agar risiko adanya *tunneling* di perusahaan dapat diantisipasi.

b. Bagi Pemegang Saham

Manfaat praktis bagi pemegang saham, supaya dapat menjadi informasi yang bermanfaat agar pemegang saham lebih memahami mengenai transaksi pihak berelasi, khususnya terkait struktur kepemilikan perusahaan dan KAP yang mengaudit perusahaan, supaya dapat mengontrol dengan baik jalannya perusahaan dimana para pemegang saham menanamkan saham mereka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Teori Agensi

Hubungan keagenan adalah hubungan antara prinsipal dan agen, yang didalamnya agen bertindak atas nama dan untuk kepentingan prinsipal, yang kemudian atas tindakannya tersebut, agen mendapatkan imbalan tertentu. Hubungan tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk kontrak. Selanjutnya, dalam teori keagenan, agen biasanya dianggap sebagai pihak yang ingin memaksimalkan dirinya, tetapi tetap selalu berusaha memenuhi kontrak. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang tidak banyak menimbulkan persengketaan dan yang mendorong pihak yang berkontrak melaksanakan apa yang diperjanjikan, yang memenuhi dua faktor sebagai berikut.

- a. Agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris artinya baik agen maupun majikan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri.
- b. Risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya. Kemudian, jika dalam konteks pelaporan keuangan, hubungan antara investor dan manajemen dapat dikarakterisasi sebagai

hubungan keagenan; pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen.

Kemudian Eisenhardt (1989) mengemukakan tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (risk adverse). Dari asumsi sifat dasar tersebut, dapat dilihat bahwa adanya konflik agensi antara manajer dan pemegang saham ditimbulkan oleh asumsi sifat dasar tersebut. Manajer akan lebih mendahulukan kepentingannya pribadinya daripada kepentingan pemegang saham, yang mana pemegang saham ini sebenarnya adalah pihak yang memberi kuasa kepada manajer untuk menjalankan perusahaan.

2. Transaksi Pihak Berelasi

a. Transaksi pihak berelasi

Transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan (PSAK No. 7 Tahun 2015). Kemudian, pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor, misalnya orang atau anggota keluarga terdekat yang memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor, atau orang atau keluarga dekat yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor, atau orang yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas. Pengendalian yang dimaksud adalah

kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional dari suatu entitas, sehingga memperoleh manfaat dari aktifitas tersebut (PSAK No. 7 Tahun 2010). Namun, pada tahun 2013 Dewan Standar Akuntansi Keuangan merevisi definisi pengendalian, yang tertuang dalam PSAK No. 65 Tahun 2013. Definisi pengendalian menjadi kemampuan menggunakan kekuatan atas *investee* untuk memengaruhi imbalan bagi hasil investor. Dan untuk pengaruh signifikan, maksudnya adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam kebijakan keuangan dan operasional dari suatu entitas, tetapi tidak mengendalikan kebijakan tersebut. Pengaruh signifikan dapat diperoleh melalui kepemilikan saham, anggaran dasar, atau perjanjian (PSAK No. 7 Tahun 2010).

b. Pihak Berelasi

Berikut adalah orang atau anggota keluarga, atau entitas yang dikategorikan mempunyai relasi dengan entitas pelapor.

1) Orang atau anggota keluarga

- a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor.
- b) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor.
- c) Personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

2) Entitas

- a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas sosial atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- c) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas lain adalah asosiasi dari entitas ketiga.
- d) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu pelapor atau entitas terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- e) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam poin (1).
- f) Orang yang diidentifikasi dalam poin (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Dalam menentukan keterkaitan sebagai pihak berelasi, batas kontrol yang ditetapkan menurut PSAK 4 Tahun 2010, pengendalian ada jika mempunyai lebih dari 50% hak suara, kecuali dapat ditunjukkan

dengan jelas tidak ada pengendalian. Kemudian, Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan revisi atas batas kontrol tersebut. PSAK No. 65 Tahun 2013 menyatakan bahwa entitas dapat mengendalikan dengan hak suara kurang dari 50%. Namun, hal tersebut dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan, termasuk:

- 1) Pengaturan kontraktual.
- 2) Hak suara potensial yang dimiliki oleh investor, pemegang suara lain, atau pihak lain.
- 3) Ukuran kepemilikan hak suara investor relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik suara lain.

c. Tipe Transaksi Berelasi

Transaksi berelasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu transaksi berelasi yang merupakan bagian dari aktivitas utama perusahaan (*continuing transaction*) dan diluar aktivitas utama (*non-recurring transaction*). Transaksi pihak berelasi yang merupakan aktivitas utama perusahaan misalnya penjualan dari suatu perusahaan kepada anak perusahaannya. Pengawasan terhadap transaksi berelasi yang merupakan kegiatan utama perusahaan merupakan suatu tantangan, terlebih karena badan regulasi tidak mewajibkan *disclosure* atas transaksi berelasi yang merupakan transaksi kegiatan utama perusahaan. Kemudian untuk contoh transaksi berelasi diluar aktivitas utama perusahaan adalah sebagai berikut. PT. Charoen Pokphand membeli tanah PT SHS Indonesia. Transaksi tersebut dikatakan transaksi berelasi diluar aktivitas utama perusahaan

karena kedua perusahaan tersebut dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama, yaitu keluarga Jiaravanon, dan memiliki kesamaan direktur dan komisaris.

d. Regulasi transaksi pihak berelasi

Kemungkinan penyalahgunaan transaksi berelasi telah diantisipasi dengan adanya beberapa peraturan. Beberapa peraturan terkait adalah sebagai berikut

- 1) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2015 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.
- 2) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK03/2010 tentang penetapan wajib pajak sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (*special purpose company*) yang mempunyai relasi dengan pihak lain dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2010 tentang Penetapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Relasi.

e. Langkah Menilai Transaksi Pihak Berelasi

Ketika melakukan penilaian apakah suatu transaksi merupakan *tunneling*, maka perlu diperhatikan beberapa hal berikut.

1) Siapa Pihak-pihak Berelasi yang Melakukan Transaksi?

Laporan keuangan di Indonesia hanya mengungkapkan struktur kepemilikan *intermediate*, yaitu struktur kepemilikan langsung dalam perusahaan publik yang ditunjukkan oleh presentase kepemilikan saham dan tidak mengungkapkan struktur kepemilikan ultimat. Kepemilikan ultimat merupakan kepemilikan langsung dan tidak langsung pada perusahaan publik. Kepemilikan langsung menggambarkan presentase saham yang dimiliki pemegang saham atas nama dirinya sendiri, sedangkan kepemilikan tidak langsung adalah kepemilikan terhadap sebuah perusahaan publik melalui rantai kepemilikan. Dengan mengetahui struktur kepemilikan ultimat, kita dapat mengetahui mata rantai kepemilikan dan mengetahui siapa sebenarnya yang mengontrol pihak-pihak yang bertransaksi tersebut.

2) Aset Apa yang Ditransfer?

Aset yang ditransfer dapat berupa kas, piutang, jasa, aset tetap, aset tidak berwujud, dan ekuitas. Dalam hal penyediaan jasa, partisipan pasar hendaknya memahami pada jasa yang diberikan, parameter kewajaran nilainya dan jangka waktu penggunaan jasa. Kemudian pada transaksi pemberian jaminan piutang kepada pihak berelasi, masyarakat perlu mencari informasi mengenai kepentingan pemegang saham

pengendali pada transaksi tersebut. Dengan struktur rantai kepemilikan, pemegang saham pengendali seringkali sulit terdeteksi. Pada intinya, pelaku pasar sebaiknya memahami aset apa yang ditransfer, dan apa kepentingan pemegang saham pengendali pada transaksi tersebut.

3) Bagaimana Penilaian Aset?

Penilaian aset dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai. Kantor Jasa Penilai akan memberikan penilaian kewajaran nilai transaksi dengan menggunakan dasar penilaian tertentu dan aset yang dapat diperbandingkan sebagai dasar penilaian.

4) Apakah Terdapat Pihak-pihak yang Berkonflik?

Dalam menilai transaksi pihak berelasi, perlu dipertimbangkan pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan, terutama jika melibatkan personel manajemen kunci dan komisaris, serta pemegang saham pengendali.

5) Mengapa Aset Ditransfer? Mengapa Sekarang?

Memahami mengapa aset harus ditransfer sekarang sangat berguna untuk mengidentifikasi penyalahgunaan transaksi pihak berelasi. Jika terdapat indikasi bahwa transaksi pihak berelasi menguntungkan pihak berelasi dan merugikan perusahaan publik, maka pemegang saham harus mempertimbangkan hal-hal berikut.

a) Mengapa aset diperdagangkan? Dalam beberapa kasus, aset diperdagangkan untuk alasan “diversifikasi”.

- b) Mengapa perusahaan publik melakukan “diversifikasi” kedalam aset yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali?
- c) Mengapa sekarang atau saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan transaksi?
- d) Jika pasar sedang mengalami kelesuan, mengapa perusahaan harus sekarang menjual aset pada pihak berelasi? Jika bisa menunggu beberapa waktu kedepan, penjualan aset perusahaan mungkin akan berpotensi dinilai lebih tinggi dibanding harga saat ini.

Dalam beberapa kasus, transaksi pihak berelasi terjadi karena pemegang saham oengendali ingin mentransfer sumber daya ke perusahaan lain dalam satu pengendalian yang sedang mengalami kerugian.

3. Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan perusahaan sangat berkaitan dengan transaksi pihak berelasi. Terdapat dua bentuk umum struktur kepemilikan di Indonesia dan Asia, yaitu:

a. Struktur kepemilikan tersebar

Struktur kepemilikan tersebar adalah suatu kepemilikan saham perusahaan, dimana pemegang saham tidak bisa mengendalikan tindakan manajemen agar bertindak sesuai kepentingan pemegang saham.

b. Struktur kepemilikan terkonsentrasi

Struktur kepemilikan tersebar adalah suatu kepemilikan saham perusahaan, dimana pemegang saham dapat mengendalikan tindakan manajemen, atau bahkan menjadi bagian dari manajemen tersebut.

Perbedaan dari kedua struktur tersebut adalah proses pengambilan keputusannya.

Pada struktur kepemilikan terkonsentrasi, pemegang saham pengendali dapat memilih dan melantik manajer yang bekerja untuk kepentingan pemilik saham pengendali. Namun, pemegang saham lain hanya sedikit, bahkan tidak mempunyai kewenangan dalam memilih manajer. Kemudian pada perusahaan yang dikendalikan oleh suatu keluarga tertentu, direktur noneksekutif umumnya adalah anggota keluarga. Pada situasi seperti itu, dalam rapat dewan, direktur menjadi tidak kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil.

Gilson dan Gordon (2003) mengidentifikasi dua kemungkinan cara yang dapat dilakukan pemegang saham pengendali untuk mendapatkan manfaat privat atas kontrol dari kebijakan perusahaan, yaitu kebijakan operasi perusahaan dan kebijakan kontraktual dengan pihak lain. Bentuk manfaat privat melalui kebijakan operasi perusahaan adalah gaji dan tunjangan tinggi, bonus dan kompensasi besar, serta dividen. Sedangkan untuk kebijakan kontraktual melalui *tunneling*.

4. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

Kantor akuntan publik (KAP) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam pemberian jasanya. KAP yang lebih besar dianggap sebagai penyedia jasa audit yang lebih mampu mempertahankan independensi daripada KAP yang lebih kecil. Selain itu, KAP yang lebih besar umumnya dianggap

sebagai penyedia kualitas audit yang tinggi dan menikmati reputasi tinggi dalam lingkungan bisnis dan karena itu, akan berusaha untuk mempertahankan independensi mereka untuk menjaga image mereka (DeAngelo, 1981 ; Dopuch, 1984 dalam Nasser et al., 2006). KAP Big four yang berafiliasi dengan auditor di Indonesia, yang terdiri dari:

- a. Ernst & Young (EY) yang berafiliasi dengan Prasetio, Sarwoko & Sandjaja; Purwantono, Sarwoko & Sandjaja.
- b. Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) yang berafiliasi dengan Sidharta Sidharta & Widjaja.
- c. Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) yang berafiliasi dengan Hans Tuanakotta Mustofa & Halim; Osman Ramli Satrio & Rekan; Osman Bing Satrio & Rekan.
- d. Price Waterhouse Cooper (PwC) yang berafiliasi dengan Haryanto Sahari & Rekan; Tanudiredja, Wibisena & Rekan.

5. Pengungkapan Transaksi Berelasi

Pada PSAK No. 1, tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi, serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Kemudian, sesuai PSAK 7, tujuan pengungkapan pihak-pihak berelasi memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian

terhadap kemungkinan bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi dan oleh transaksi dan saldo, termasuk komitmen, dengan pihak-pihak tersebut. Pernyataan ini diterapkan dalam:

- a) Mengidentifikasi hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.
- b) Mengidentifikasi saldo, termasuk komitmen antara entitas dengan pihak-pihak berelasi.
- c) Mengidentifikasi keadaan pengungkapan yang disyaratkan di huruf (a) dan (b).
- d) Menentukan pengungkapan yang dilakukan mengenai butir-butir tersebut.

Selanjutnya, pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri entitas induk atau investor dengan pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan atas, investee yang disajikan sesuai dengan PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian atau PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri. Pernyataan ini juga diterapkan untuk laporan keuangan individual.

Kemudian, jika entitas memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi dalam satu periode, maka entitas mengungkapkan:

- a) Sifat dari hubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

- b) Informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, yang diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan.
- c) Sekurang-kurangnya, pengungkapan meliputi:
 - 1) Nilai transaksi.
 - 2) Jumlah saldo, termasuk komitmen.
 - 3) Penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut.
 - 4) Beban yang diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hani Wendi Apriani (2015) yang berjudul “Pengaruh *Corporate Governance* dan Karakteristik Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi di Indonesia”. Penelitian Apriani (2015) bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan transaksi pihak berelasi di Indonesia, dengan variabel dependennya adalah pengungkapan transaksi pihak berelasi, serta variabel independennya adalah *Level of Ownership Concentration*, presentase komisaris independen dalam dewan komisaris, profitabilitas perusahaan, dan level diversifikasi perusahaan. Kemudian terdapat pula variabel kontrol, yaitu jenis industri dan ukuran perusahaan. Perbedaan penelitian Apriani (2015) dengan penelitian ini

terletak pada variabel independen yang digunakan. Pada penelitian ini, variabel independennya adalah struktur kepemilikan dan ukuran KAP. Untuk variabel dependen, penelitian Apriani (2015) meneliti luas pengungkapan transaksi pihak berelasi, sedangkan penelitian ini meneliti tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi, namun kedua penelitian ini masih dalam konteks pengungkapan transaksi berelasi.

2. Penelitian oleh Cynthia A. Utama (2015) dengan judul “Penentu Besaran Transaksi Pihak Berelasi: Tata Kelola, Tingkat Pengungkapan, dan Struktur Kepemilikan”. Utama (2015) memiliki tujuan untuk menginvestigasi RPT dari sisi “*the conflict of interest hypothesis*”. Secara spesifik yang diteliti adalah besaran RPT yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas untuk melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas. Variabel dependen pada penelitian ini berbeda dengan variabel dependen pada penelitian Utama (2015). Penelitian Utama (2015) menggunakan variabel dependen besaran transaksi pihak berelasi. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel dependen pengungkapan transaksi berelasi. Akan tetapi, terdapat kesamaan variabel independen, yaitu struktur kepemilikan.

C. Kerangka Berpikir

- 1. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi berdasarkan PSAK No 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi**

Struktur kepemilikan merupakan komitmen dari pemegang saham untuk mendelegasikan pengendalian dengan tingkat tertentu kepada manajer (Burkat, et.al, 1997 dalam Nugraha, 2010). Adanya perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor dapat mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan. Semakin banyak pihak yang butuh informasi tentang perusahaan, maka semakin detail pula pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut menyebabkan struktur kepemilikan menjadi faktor yang cukup kuat dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan (Alvionita dan Taqwa, 2015). Penelitian Nugroho (2012) menyebutkan, semakin besar saham yang dimiliki oleh publik maka akan semakin banyak pula butir-butir pengungkapan laporan keuangan yang dikehendaki oleh para investornya, sehingga akan semakin tinggi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan perusahaan.

Pada peneliti ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh struktur kepemilikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi pada laporan keuangan perusahaan sektor utama BEI tahun 2016.

2. Pengaruh Ukuran KAP terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi berdasarkan PSAK No 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi

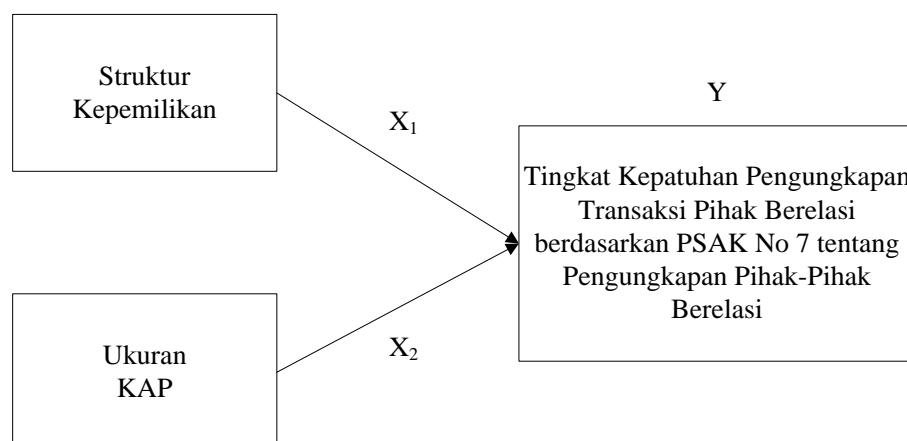
Semakin besar ukuran KAP, maka integritas laporan keuangan perusahaan yang diaudit juga semakin tinggi. Hal ini dikarenakan KAP yang besar memiliki insentif yang lebih untuk menghindari hal-hal yang dapat

merusak reputasinya dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil (DeAngelo, 1981 dalam Astria, 2011). Reputasi tinggi yang dimiliki KAP berukuran besar dianggap dapat menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi pula. KAP akan memastikan pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan yang diaudit dapat mengungkapkan dengan jelas informasi perusahaan, dengan kemampuan memberikan saran kepada perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi perusahaan yang dimiliki oleh KAP berukuran besar.

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh ukuran KAP terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi pada laporan keuangan perusahaan sektor utama BEI tahun 2016.

D. Paradigma Penelitian

Berdasarkan teori, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir diatas, diperoleh paradigma penelitian sebagai berikut.



Gambar 1. Paradigma Penelitian

Keterangan:

—————→	= Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
-----→	= Pengaruh variabel secara simultan
X_1, X_2	= Variabel independen
X_3	= Seluruh variabel independen
Y	= Variabel Dependen

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori, kerangka berpikir, dan paradigma penelitian, yang telah dikemukakan, diperoleh hipotesis sebagai berikut.

1. H1 = struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi.
2. H2 = ukuran KAP berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kausal komparatif, yang merupakan penelitian yang bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala, atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku, atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas yang secara keseluruhan sudah terjadi (Widarto, 2013). Berdasarkan jenis data yang digunakan, penelitian ini dikatakan sebagai penelitian kuantitatif, karena data yang digunakan berupa angka-angka. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Data tersebut diakses pada laman <http://www.idx.co.id>. Penelitian ini menguji pengaruh struktur kepemilikan dan ukuran KAP terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi berdasarkan PSAK No 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi.

B. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan listing BEI tahun 2016, yang diperoleh dari <http://www.idx.co.id> dan sumber lain yang relevan. Kemudian, penelitian ini dilakukan mulai bulan Desember tahun 2017 hingga Juli 2018.

C. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasinya adalah perusahaan-perusahaan sektor utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016.

D. Sampel

Penentuan sampel untuk penelitian ini menggunakan *purposive sampel*. Sugiyono (2011) mendefinisikan *purposive sample* sebagai teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa representatif. Untuk penelitian ini, kriteria yang ditetapkan untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian adalah perusahaan yang *listed* di BEI selama tahun 2016.
2. Perusahaan termasuk dalam perusahaan sektor utama yakni perusahaan sektor pertambangan dan sektor pertanian dikarenakan kedua sektor tersebut merupakan sektor penghasil bahan baku yang dinilai memiliki kemungkinan lebih tinggi terjadinya transaksi berelasi dengan tujuan oportunistik.
3. Perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit.

4. Merupakan perusahaan non BUMN. Hal tersebut diatur dalam PSAK No 07 Tahun 2015 Paragraf 28, karena terdapat perbedaan peraturan pengungkapan antara perusahaan BUMN dan non BUMN.
5. Memiliki informasi tentang pengungkapan transaksi pihak berelasi (*Related Party Transaction*).

E. Definisi Operasional

1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen, yang selanjutnya dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi, atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiiyono, 2011:39). Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel dependen adalah pengungkapan transaksi berelasi berdasarkan PSAK No 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi.

Pengungkapan pihak-pihak berelasi memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi dan oleh transaksi dan saldo, termasuk komitmen, dengan pihak-pihak tersebut. Kemudian, jika entitas memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi dalam satu periode, maka entitas mengungkapkan:

- a) Sifat dari hubungan dengan pihak-pihak berelasi
- b) Informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, yang diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan.
- c) Sekurang-kurangnya, pengungkapan meliputi:
 - 1) jumlah transaksi;
 - 2) jumlah saldo, termasuk komitmen, dan:
 - (i) syarat dan ketentuannya, termasuk apakah terdapat jaminan, dan sifat imbalan yang akan diberikan, dalam penyelesaian; dan
 - (ii) rincian jaminan yang diberikan atau diterima;
 - 3) penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut; dan
 - 4) beban yang diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang dari pihak-pihak berelasi.

Pengukuran pengungkapan transaksi pihak berelasi adalah sebagai berikut.

$$discRPT = \frac{np}{tp} \times 100\%$$

Keterangan:

discRPT : tingkat pengungkapan RPT

np : nilai pengungkapan

tp : total pengungkapan yang diharuskan

Berdasarkan poin-poin yang harus diungkapkan menurut PSAK nomor 7 tahun 2015, rincian dari total pengungkapan di PSAK yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Sifat hubungan dengan pihak berelasi (PSAK 7 paragraf 13)
- b) Kompensasi personil manajemen kunci (PSAK 7 paragraf 17)
- c) Jumlah transaksi (PSAK 7 paragraf 18)
- d) Jumlah saldo (PSAK 7 paragraf 18)
- e) Komitmen, termasuk syarat dan ketentuan, serta rincian jaminan (PSAK 7 paragraf 18)
- f) Penyisihan piutang-ragu-ragu (PSAK 7 paragraf 18)
- g) Beban yang diakui dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang dari pihak berelasi (PSAK 7 paragraf 18)

2. Variabel Independen

Variabel independen atau sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, *antecedent*, yang selanjutnya dalam bahasa indonesia sering disebut variabel bebas, adalah variabel yang mempengaruhi, atau menjadi sebab perubahannya, atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2011:39). Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel independen adalah sebagai berikut.

a. Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan diukur dengan melihat persentase kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan perusahaan (Nugraha, 2010). Kepemilikan Publik menurut Wijayanti (2009) adalah proporsi atau jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan.

$$\text{Kepemilikan Publik} = \frac{\text{Total Kepemilikan Saham Publik}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

b. Ukuran KAP

Ukuran KAP dilihat dari besar kecilnya KAP yang mengaudit perusahaan. Untuk membedakan ukuran besar kecilnya KAP, dilihat dari hubungan afiliasi yang dimiliki oleh KAP. Pengukuran menggunakan variabel *dummy*, yaitu dengan memberikan angka 1 untuk KAP yang berafiliasi dengan *Big 4* dan 0 sebaliknya (Fodio, dkk. 2015).

$$\text{KAP } \textit{Big 4} = 1$$

$$\text{KAP } \textit{non Big 4} = 0$$

KAP Big four yang berafiliasi dengan auditor di Indonesia, yang terdiri dari:

- a. Ernst & Young (EY) yang berafiliasi dengan Prasetio, Sarwoko & Sandjaja; Purwantono, Sarwoko & Sandjaja.
- b. Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) yang berafiliasi dengan Sidharta Sidharta & Widjaja.
- c. Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) yang berafiliasi dengan Hans Tuanakotta Mustofa & Halim; Osman Ramli Satrio & Rekan; Osman Bing Satrio & Rekan.
- d. Price Waterhouse Cooper (PwC) yang berafiliasi dengan Haryanto Sahari & Rekan; Tanudiredja, Wibisena & Rekan.

F. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode dokumentasi, yaitu kegiatan pengumpulan data sekunder, seperti laporan keuangan (*financial report*) dan laporan keuangan tahunan (*annual report*).

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian. Kegiatan ini dilakukan setelah peneliti memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian. Tujuannya adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah diinterpretasikan dan mudah dipahami.

Dalam penelitian ini, langkah yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Statistik Deskriptif

Sugiyono (2011:147) menyebutkan bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Statistik deskriptif juga dapat digunakan untuk mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Dalam analisis korelasi, regresi, atau perbandingan dengan membandingkan dua rata-rata atau lebih, tidak perlu diuji signifikansinya. Secara teknis, dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi, tidak ada taraf kesalahan,

karena penelitian tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan generalisasi.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual terdistribusi normal. Jadi, uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel, tetapi pada nilai residualnya (Kurniawan, 2014:156).

b. Uji Linearitas

Ghozali (2011) menjelaskan uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Pengujian ini dapat menggunakan model langerange multiplier dengan cara menghitung nilai c^2 yang diperoleh dari $(n \times R^2)$. Apabila nilai c^2 hitung $>$ c^2 tabel, maka hipotesis yang menyatakan model linear tersebut ditolak.

c. Uji Multikolinearitas

Kurniawan (2014:156) menjelaskan bahwa uji ini bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi antara variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Uji multikolinearitas dilakukan juga untuk tujuan menghindari kebiasaan dalam pengambilan

kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

d. Uji Heteroskedastisitas

Kurniawan (2014:156) menjelaskan uji ini digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah yang memiliki kesamaan varians dari residual dari pengamatan satu ke pengamatan yang lain, atau disebut homoskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan *Regresi Linier Multiple* adalah model persamaan regresi linier dengan variabel bebas lebih dari satu (Kurniawan, 2014:179). Sebelumnya, telah diawali dengan pengujian asumsi klasik. Adapun rumus dari regresi linier berganda (multiple linier regresion) secara umum adalah sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots + e$$

Kemudian, berdasarkan mekanisme hubungan antar variabel maka formulasi matematis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi

a : Konstanta

b₁, b₂ : Koefisien X₁, X₂, X₃, X₄

X1 : Struktur Kepemilikan

X2 : Ukuran KAP

e : error

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Struktur Kepemilikan dan Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi berdasarkan PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi pada perusahaan sektor utama BEI yang *listed* selama tahun 2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang diakses melalui laman <http://idx.co.id>.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam sektor utama di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang tercatat hingga tanggal 30 Desember 2016 untuk periode tahun 2016. Populasi penelitian ini berjumlah 59 perusahaan. Dari jumlah populasi sebanyak 59 perusahaan tersebut, yang digunakan untuk sampel pada penelitian ini menjadi 52 perusahaan. Jumlah ini berkurang karena adanya kriteria sampel. Sebanyak 6 perusahaan tidak diikutsertakan dalam sampel karena perusahaan terkait tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan untuk tahun 2016, serta sebanyak 1 perusahaan tidak diikutsertakan karena berelasi dengan pemerintahan.

Berikut adalah rincian populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Jumlah Perusahaan Sektor Utama BEI

Sektor Utama	Jumlah
Sektor Pertanian	
Sektor Perkebunan	16
Sektor Peternakan	0
Sektor Perikanan	3
Lainnya	1
Total Sektor Pertanian	20
Sektor Pertambangan	
Batubara	21
Minyak dan Gas Bumi	7
Logam dan Mineral Lainnya	9
Batu-batuan	2
Lainnya	0
Total Sektor Pertambangan	39
Total Sektor Utama	59

Tabel 2. Hasil Seleksi Sampel

Kriteria Sampel	N
Perusahaan Sektor Utama	59
Tidak melaporkan Laporan Keuangan	(6)
Tidak memiliki pihak berelasi/pihak berelasi dengan pemerintah	(1)
Jumlah sampel yang digunakan	52

B. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan deskripsi data dari seluruh variabel yang akan dimasukkan dalam model penelitian. Hasil dari tabulasi data struktur kepemilikan dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) diinterpretasikan dalam nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi untuk masing-masing variabel.

1. Transaksi Pihak Berelasi

Tabel 3. Statistik Deskriptif Transaksi Pihak Berelasi

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Dev.
Transaksi Pihak Berelasi	52	0,000	0,857	0,49996	0,206710

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas, Transaksi Pihak Berelasi memiliki nilai minimum sebesar 0, yang mencerminkan bahwa perusahaan tersebut melakukan transaksi dengan pihak berelasi, namun didalam laporan keuangannya tidak menjelaskan lebih lanjut sesuai dengan butir-butir yang terdapat pada *checklist* pengungkapan transaksi berelasi. Terdapat dua perusahaan yang tidak menjelaskan transaksi berelasi tersebut, yaitu PT Inti Agri Resources Tbk. dan PT Perdana Karya Perkasa Tbk. Nilai maksimum sebesar 0,857 menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang mengungkapkan sebanyak enam dari tujuh butir-butir *checklist* pengungkapan transaksi berelasi. Rata-rata kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi sebesar 0,500.

2. Struktur Kepemilikan

Tabel 4. Statistik Deskriptif Struktur Kepemilikan

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Dev.
Struktur Kepemilikan	52	2,47	86,84	30,1542	19,94178

Sumber: Data diolah, 2018

Struktur Kepemilikan, dalam hal ini dicerminkan oleh Persentase Kepemilikan Publik, memiliki nilai minimum sebesar 2,47 yang berarti kepemilikan publik paling rendah sebesar 2,47% seperti yang ada pada perusahaan Toba Bara Sejahtera Tbk. Nilai maksimum sebesar 86,84 menunjukkan bahwa kepemilikan publik paling tinggi sebesar 86,84% yang berada pada perusahaan Inti Agri Resources Tbk. Rata-rata variabel independen struktur kepemilikan sebesar 30,1542.

3. Ukuran KAP

Tabel 5. Statistik Deskriptif Ukuran KAP

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Dev.
Ukuran KAP	52	0	1	0,42	0,499

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas, ukuran KAP memiliki nilai minimum sebesar 0,00 yang berarti perusahaan diaudit oleh auditor eksternal yang tidak berafiliasi dengan KAP Big 4. Sementara itu, nilai maksimum dari struktur kepemilikan adalah sebesar 1,00 yang berarti perusahaan diaudit oleh auditor eksternal yang berafiliasi dengan KAP *Big 4*. Jumlah perusahaan yang diaudit oleh KAP terafiliasi *Big 4* sebanyak dua puluh dua perusahaan, sedangkan

tigah puluh perusahaan yang lain diaudit oleh KAP yang tidak berafiliasi dengan Big 4. Nilai rata-rata ukuran KAP sebesar 0,42.

C. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan melihat nilai Asymp. Sig. (2-tailed) menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai dari Sig. < 0,5 maka data tidak terdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika nilai Sig. > 0,5 maka data dapat dikatakan telah sesuai dengan syarat distribusi normal.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

Variabel	N	Signifikansi	Keterangan
Data Residual	52	0,200	Data terdistribusi secara normal

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 6, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov adalah 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Pendeteksian multikolinearitas dilakukan dengan menganalisis nilai tolerance dan VIF. Jika nilai determinasi VIF > 10 dan angka tolerance < 0,10, maka terjadi masalah multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai VIF < 10

bersamaan dengan nilai tolerance $> 0,10$, maka penelitian dianggap bebas dari masalah multikolinearitas.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Kesimpulan
Struktur Kepemilikan	0,922	1,085	Tidak ada multikolinearitas
Ukuran KAP	0,922	1,085	Tidak ada multikolinearitas

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* dan VIF dari Struktur Kepemilikan adalah 0,922 dan 1,085. Nilai *Tolerance* dan VIF dari Ukuran KAP juga 0,922 dan 1,085. Nilai *Tolerance* dari semua variabel independen adalah lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak memiliki masalah multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode Uji Park. Dalam Uji Park, model regresi dapat dikatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila probabilitas signifikansi variabel bernilai lebih dari 0,05.

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Nilai Kritis	Keterangan
Struktur Kepemilikan (X_1)	0,365	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Ukuran KAP (X_2)	0,159	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa parameter koefisien untuk semua variabel independen memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak memiliki masalah heteroskedastisitas.

4. Uji Linearitas

Tabel 9. Hasil Uji Linearitas

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,252 ^a	,064	,025	,19400

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Hasil uji linearitas dengan Uji Lagrange Multiplier dapat dilihat pada Tabel 9. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa nilai R^2 adalah 0,064. Rumus untuk menghitung nilai C^2 hitung adalah total sampel dikalikan dengan R^2 hitung, sehingga nilainya adalah 3,382 ($52 \times 0,064$). Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai C^2 tabel dengan $df=51$ dan tingkat signifikansi 0,05 yaitu 68,67. Dengan demikian, nilai C^2 hitung lebih kecil daripada nilai C^2 tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini adalah linear.

D. Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan uji asumsi klasik yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa data dalam penelitian ini layak untuk diolah dalam pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil analisis regresi linear berganda dengan menggunakan perangkat lunak pengolah data dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien Regresi	Sig. t	Alpha
Konstanta	0,479	-	-
Struktur Kepemilikan	-0,001	0,612	0,05
Ukuran KAP	0,104	0,085	0,10
<i>r square</i>	0,078		
<i>Sig. F</i>	0,135		

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Pada tabel 10, terlihat bahwa masing masing variabel penelitian yang digunakan telah memiliki koefisien regresi yang dapat dibuat kedalam sebuah model regresi berganda seperti terlihat dibawah ini:

$$Y = 0,479 - 0,001 X_1 + 0,104 X_2$$

Sesuai dengan hasil pengujian, terlihat nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,078. Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa variabel struktur kepemilikan dan ukuran KAP mampu memberikan kontribusi sebesar 0,078 atau 7.8% sedangkan sisanya sebesar 92,2% lagi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan didalam penelitian ini.

Pada model analisis juga diperoleh nilai F-sig sebesar 0,135. Pada tahapan pengujian statistik, digunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05. Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,135 lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa struktur kepemilikan dan ukuran KAP merupakan variabel yang kurang kuat untuk dijadikan prediktor tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi.

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi.

a. Persamaan Regresi

Berdasarkan hasil uji regresi linear yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel memiliki nilai signifikansi t lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,612, sehingga persamaan garis regresi untuk hipotesis pertama dianggap tidak ada. Seperti yang dikemukakan oleh Azwar (2005), saat hasil analisis menunjukkan tidak signifikan, maka nilai dari variabel terkait diabaikan.

b. Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil uji regresi linear yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa arah model regresi ini adalah negatif. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar -0,001. Koefisien

determinasi (*r square*) memiliki nilai sebesar 0,078 yang berarti variabel struktur kepemilikan memiliki pengaruh sebesar 7,8% terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi, sedangkan sebesar 92,2% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Namun, karena variabel struktur kepemilikan tidak signifikan, maka pengaruh sebesar 7,8% tersebut dianggap tidak ada atau dalam kata lain menjadi 0%.

c. Uji t

Uji regresi linear menghasilkan nilai signifikansi t sebesar 0,612, dimana angka signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan “struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi” tidak didukung.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah ukuran KAP berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi.

a. Persamaan Regresi

Berdasarkan Tabel 10, persamaan regresi linear sederhana dalam pengujian hipotesis kedua adalah sebagai berikut.

$$Y = 0,479 + 0,104 X_2$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat dilihat bahwa jika variabel ukuran KAP dianggap konstan, maka nilai kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi adalah 0,479. Selain itu, dapat dilihat bahwa koefisien regresi memiliki nilai sama dengan 0,104. Hal ini menunjukkan bahwa jika ukuran KAP afiliasi Big 4 bertambah sebesar 1 poin, maka kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi akan bertambah sebesar 0,104 dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain dianggap konstan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi.

b. Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil uji regresi linear yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa arah model regresi ini adalah positif. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,104. Koefisien determinasi (*r square*) memiliki nilai sebesar 0,078 yang berarti variabel ukuran KAP memiliki pengaruh sebesar 7,8% terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi, sedangkan sebesar 92,2% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

c. Uji t

Uji regresi linear menghasilkan nilai signifikansi t sebesar 0,085, dimana angka signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,10. Pada variabel ukuran KAP yang menggunakan variabel *dummy*, signifikansi dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai

signifikansi lebih kecil dari 0,10 (Juvita dan Siregar, 2013). Karena signifikansi dalam penelitian ini lebih kecil dari 0,10, maka hipotesis “ukuran KAP berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi” didukung.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh struktur kepemilikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah Struktur Kepemilikan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi. Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai koefisien regresi adalah sebesar -0,001, yang menunjukkan arah negatif. Signifikansi menunjukkan angka sebesar 0,612 dimana angka tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini tidak didukung.

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan hasil penelitian Apriani (2015), yaitu struktur kepemilikan (tingkat konsentrasi kepemilikan) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan transaksi berelasi. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Santioso dan Yenny (2012), bahwa terjadi korelasi negatif antara porsi saham publik dan kelengkapan pengungkapan wajib. Penelitian Rofika dan Apsari (2011) menunjukkan hasil

proporsi kepemilikan saham publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang telah dilakukan, nilai rata-rata kepemilikan saham publik di perusahaan tergolong rendah, yaitu sebesar 30,1542. Kepemilikan saham publik disebuah perusahaan umumnya hanya merupakan investor dengan kepemilikan saham dibawah 5%, atau dapat disebut dengan pemegang saham minoritas, yang mana kurang memiliki kekuatan untuk mendorong manajemen melakukan pengungkapan untuk memenuhi kebutuhan informasinya.

Melihat sampel perusahaan pada penelitian ini, dari 52 sampel yang diteliti, hanya 8 perusahaan yang kepemilikan publiknya diatas 50%. Sebanyak 44 perusahaan lainnya kepemilikan publiknya dibawah 50%, yang berarti banyak perusahaan di Indonesia yang persentase kepemilikannya publiknya kecil. Untuk pengungkapan, rata-rata poin pengungkapan transaksi pihak berelasi dalam penelitian ini adalah 3,5 poin dari total 7 poin pengungkapan. Dari 8 perusahaan yang kepemilikan publiknya diatas 50% tersebut, hanya 3 perusahaan yang poin pengungkapannya diatas 3,5 dimana 2 perusahaan mengungkapkan 5 poin dan 1 perusahaan mengungkapkan 6 poin. Sedangkan dari 44 perusahaan yang kepemilikan publiknya dibawah 50%, sebanyak 25 perusahaan poin pengungkapannya diatas 3,5. Hal ini membuat hipotesis pengaruh positif struktur kepemilikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi tidak dapat dibuktikan.

2. Pengaruh ukuran KAP terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah ukuran KAP berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi. Nilai koefisien regresi adalah sebesar 0,104. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran KAP memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi. Signifikansi menunjukkan angka sebesar 0,085 dimana angka tersebut lebih kecil dari 0,10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

Koefisien determinasi (*r square*) memiliki nilai sebesar 0,078 yang berarti variabel ukuran KAP memiliki pengaruh sebesar 7,8% terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi, sedangkan sebesar 92,2% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Hasil pengujian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran KAP, maka integritas laporan keuangan perusahaan yang diaudit juga semakin tinggi. Hal ini dikarenakan KAP yang besar memiliki insentif yang lebih untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak reputasinya dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil (DeAngelo, 1981 dalam Astria, 2011).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ahmad (2017) yang menyatakan bahwa KAP besar memiliki kemampuan untuk memberikan

saran-saran kepada perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi perusahaannya.

F. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini sudah dilaksanakan sesuai prosedur ilmiah, namun masih memiliki keterbatasan, diantaranya:

1. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan.
2. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa masih banyak variabel yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi, namun belum digunakan dalam penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh Struktur Kepemilikan dan Ukuran KAP terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi berdasarkan PSAK No 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Struktur Kepemilikan tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi berdasarkan PSAK No 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi pada perusahaan sektor utama BEI tahun 2016. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang telah dilakukan, nilai rata-rata kepemilikan saham publik di perusahaan tergolong rendah, yaitu sebesar 30,1542. Kepemilikan saham publik disebuah perusahaan umumnya hanya merupakan investor dengan kepemilikan saham dibawah 5%, atau dapat disebut dengan pemegang saham minoritas, yang mana kurang memiliki kekuatan untuk mendorong manajemen melakukan pengungkapan untuk memenuhi kebutuhan informasinya.
2. Ukuran KAP memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi berdasarkan PSAK No 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi pada perusahaan sektor utama BEI tahun 2016. Semakin besar ukuran KAP, maka integritas laporan keuangan

perusahaan yang diaudit juga semakin tinggi. Hal ini dikarenakan KAP yang besar memiliki insentif yang lebih untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak reputasinya dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil. Selain itu, KAP besar memiliki kemampuan untuk memberikan saran-saran kepada perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi perusahaannya, dalam hal ini KAP dapat menyarankan perusahaan untuk mengungkapkan dengan detail mengenai transaksi berelasi yang terjadi di perusahaan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan harus dapat mematuhi aturan mengenai transaksi berelasi dan melakukan pengawasan apabila di perusahaannya terdapat transaksi pihak berelasi, dalam hal ini terkait pengungkapan transaksi berelasi, agar transparansi kepada pengguna laporan keuangan dan masyarakat dapat tercapai. Selain itu, agar risiko adanya *tunneling* di perusahaan dapat diantisipasi.

2. Bagi Pemegang Saham

Pemegang saham harus lebih memahami mengenai transaksi yang ada pada perusahaan, dalam hal ini transaksi pihak berelasi yang terjadi pada perusahaan, supaya dapat ikut mengontrol dengan baik jalannya perusahaan

dimana para pemegang saham menanamkan saham mereka, sekalipun kepemilikan sahamnya kecil.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian selanjutnya perlu untuk menambahkan faktor lain sebagai variabel independen, karena masih banyak faktor yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi.
- b. Objek penelitian perlu diperluas pada sektor-sektor lain yang ada di BEI, sehingga jumlah sampel akan semakin banyak, sehingga penelitian dapat mewakili seluruh sektor perusahaan yang ada di BEI.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Rudy dan Ratna Candra Sari. 2017. Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan Rerangka Integrated Reporting. *Jurnal Nominal*. Diakses pada 29 Juni 2018.
- Alvionita, Intan dan Salma Taqwa. 2015. Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*. *Book of Proceedings published by (c)*. ([http://fe.unp.ac.id/sites/default/files/unggahan/25.%20Intan%20Alvionita,%20Salma%20Taqwa%20\(hal%20590-601\)_0.pdf](http://fe.unp.ac.id/sites/default/files/unggahan/25.%20Intan%20Alvionita,%20Salma%20Taqwa%20(hal%20590-601)_0.pdf)) diakses pada 4 Januari 2018.
- Apriyani, Hani Werdi. 2015. Pengaruh *Corporate Governance* dan Karakteristik Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*. (<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jai/article/view/876>) diakses pada 28 Desember 2017.
- Astria, Tia. 2011. Analisis Pengaruh Audit Tenure, Struktur Corporate Governance, dan Ukuran Kap terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang. Diakses pada 4 Januari 2018.
- Azwar, Saifuddin. 2005. Signifikan Atau Sangat Signifikan?. *Jurnal*. (<https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/viewFile/13410/9620>) diakses pada Juli 2018.

- Ferdinal, Mochammad Ferry. 2017. *Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Pengungkapan Sukarela dengan Efektifitas Dewan Komisaris dan Komite Audit sebagai Variabel Pemoderasi*. Skripsi. Universitas Indonesia. Diakses pada 20 November 2017.
- Fodio, M. I., Oba, V. C., Oiukoju, A. B., & Zik-rullahi, A. A. 2015. IFRS Adoption, Firm Traits and Audit Timeliness: Evidence from Nigeria. *ACTA UNIVERSITATIS DANUBIUS Vol. 11, No. 3, 106-119*. (<http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oconomica/article/view/2513>) diakses pada 28 Desember 2017.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Heriyanto, Wimbo., Meihendri, dan Muchlizul Hamdi. 2016. Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Ukuran Kap terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Risiko Keuangan: Corporate Governance sebagai Pemoderasi. *Jurnal*. (<http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFEK&page=article&op=view&path%5B%5D=6522>) diakses pada 28 Desember 2017.
- Juvita, Desriana dan Sylvia Veronica Siregar. 2013. Pengaruh Corporate Governance terhadap hubungan Besaran dan Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi dengan Manajemen Laba: Studi Empiris Perubahan PSAK No. 7. *Jurnal*.

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/view/12061>)

diakses pada Juli 2018.

Kurniawan, Albert. 2014. *Metode Riset untuk Ekonomi & Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Nasser, et. al. 2006. Auditor-client relationship: The case of audit tenure and auditor switching in Malaysia. *Managerial Auditing Journal*.

(https://www.researchgate.net/publication/239781174_Auditor-client_relationship_The_case_of_audit_tenure_and_auditor_switching_in_Malaysia) diakses pada 4 Januari 2018.

Nugraha, Vendi Cahya. 2010. *Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba (Earnings Management) dalam Industri Manufaktur dan Non Manufaktur Periode 2001-2006 di Indonesia*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Diakses pada 28 Desember 2017.

Nugroho, Agus Sumamadi. 2016. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tingkat Keluasan Pengungkapan Laporan Keuangan pada Sektor Industri Makanan Dan Minuman. *Jurnal*. (<https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/viewFile/840/794>) diakses pada November 2017.

Perwitasari, Dian. 2014. Struktur Kepemilikan, Karakteristik Perusahaan, dan Manajemen Laba. *Jurnal Muktiakuntansiparadigma*. (<http://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/325>) diakses pada 3 Februari 2018.

- Pitasari, Anggita dan Aditya Septiani. 2014. Analisis Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Konvergensi IFRS pada Laporan Laba Rugi Komprehensif. *Diponegoro Journal of Accounting*. (<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/viewFile/6093/5880>) diakses pada 28 Desember 2017.
- Rofika dan Mustika Debby Apsari. 2011. Faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Sorot*. (<https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JS/article/view/1994/0>) diakses pada Mei 2018.
- Santioso, Linda dan Yenny. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. *Jurnal*. (<http://journal.binus.ac.id/index.php/winners/article/view/654>) diakses pada Mei 2018.
- Sari, Ratna Candra dan Sugiharto. 2014. *Tunneling dan Corporate Governance*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Silvania, Laurent. 2012. Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Transaksi Pihak yang Berelasi Terhadap Daya Informasi Akuntansi pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*. Diakses pada 20 November 2017.
- Sitorus, Novita Jayanti dan Aloysia Yanti Ardiati. Pengaruh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Baru, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Ukuran

- Perusahaan dan Umur Perusahaan terhadap *Audit Report Lag*. *Modus Journals*. (<https://ojs.uajy.ac.id/index.php/modus/article/view/1328>) diakses pada 28 Desember 2017.
- Stephanie dan Rosinta Ria Panggabean. 2013. Analisis Pengaruh Pengungkapan Pihak Berelasi (PSAK 7 Revisi 2010) dalam Laporan Keuangan Perusahaan yang Terdaftar di BEI Terhadap Harga Saham. *eprints*. (<http://eprints.binus.ac.id/27521/>). Diakses pada 20 November 2017.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utama, Cynthia Afriani. 2015. Penentu Besaran Transaksi Pihak Berelasi: Tata Kelola, Tingkat Pengungkapan, dan Struktur Kepemilikan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. (<http://jaki.ui.ac.id/index.php/home/article/view/310>). Diakses pada 28 Desember 2017.
- Widarto. 2013. *Penelitian Ex Post Facto*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Widyawati. 2013. Faktor Faktor yang Mendorong Kelengkapan Pengungkapan Risiko Pada Perusahaan Terbuka di Indonesia. *Tesis*. Akuntansi Keuangan Universitas Dipenegoro, Semarang. (http://eprints.undip.ac.id/35288/1/Jurnal_Skripsi.pdf) diakses pada 28 Desember 2017.
- Wijayanti, Ngestiana. 2009. Pengaruh Profitabilitas, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Publik terhadap Ketepatan waktu

pelaporan keuangan. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Diakses pada 18 Juli 2018.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Sampel

No	Perusahaan	X ₁	X ₂	Y
1	AALI	20,32%	1	0,571
2	ADRO	42,77%	1	0,714
3	ANJT	7,66%	1	0,286
4	ARII	26,47%	0	0,286
5	ARTI	34,57%	0	0,143
6	ATPK	11,06%	0	0,714
7	BIPI	50,25%	0	0,429
8	BSSR	8,38%	0	0,286
9	BTEK	26,53%	0	0,429
10	BUMI	70,57%	0	0,286
11	BWPT	30,92%	1	0,143
12	BYAN	4,99%	1	0,714
13	CITA	3,16%	0	0,714
14	CPRO	43,22%	1	0,429
15	CTTH	41,53%	0	0,571
16	DEWA	63,92%	0	0,714
17	DKFT	16,36%	0	0,571
18	DOID	54,57%	0	0,286
19	DSFI	25,88%	0	0,429
20	DSNG	34,12%	1	0,714
21	ENRG	68,09%	0	0,714
22	ESSA	44,65%	1	0,571
23	GEMS	3,00%	1	0,571
24	GOLL	22,00%	0	0,571
25	GTBO	39,91%	0	0,857
26	GZCO	32,38%	0	0,571
27	HRUM	26,29%	1	0,571
28	IIKP	86,84%	0	0,000
29	INCO	20,49%	1	0,714
30	ITMG	31,90%	1	0,571
31	JAWA	29,03%	0	0,429
32	KKGI	32,35%	0	0,571
33	LSIP	40,38%	1	0,714
34	MBAP	10,00%	1	0,571
35	MDKA	4,40%	0	0,571
36	MEDC	19,55%	1	0,429
37	MITI	19,48%	0	0,286

38	MYOH	22,25%	1	0,714
39	PALM	11,43%	0	0,286
40	PKPK	44,86%	0	0,000
41	PSAB	7,50%	0	0,429
42	PTRO	18,76%	1	0,429
43	RUIS	38,96%	0	0,286
44	SGRO	24,37%	1	0,571
45	SIMP	19,86%	1	0,857
46	SMAR	2,80%	0	0,429
47	SMMT	26,86%	1	0,286
48	SMRU	51,01%	0	0,429
49	SSMS	26,66%	1	0,571
50	TBLA	48,67%	0	0,429
51	TOBA	2,47%	1	0,714
52	UNSP	73,57%	0	0,857

Lampiran 2. Instrumen Penelitian Variabel Y

Instrumen	Ya	Tidak
Sifat hubungan dengan pihak- pihak berelasi		
Kompensasi personil manajemen kunci secara total dan untuk masing-masing kategori imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan jangka panjang lain, pesangon pemutusan kontrak kerja dan pembayaran berbasis saham		
Jumlah transaksi		
Jumlah saldo		
Komitmen dan persyaratan dan ketentuannya termasuk apakah terdapat jaminan dan sifat imbalan yang akan diberikan untuk penyelesaian dan rincian garansi yang diberikan atau diterima		
Penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut		
Beban yang diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang dari pihak – pihak berelasi.		

Lampiran 3. PSAK No. 7

12. Dalam definisi pihak-pihak berelasi, suatu entitas asosiasi mencakup entitas anak dari entitas asosiasi tersebut dan suatu ventura bersama mencakup entitas anak dari ventura bersama tersebut. Oleh karena itu, sebagai contoh, entitas anak dari entitas asosiasi dan investor yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas asosiasi tersebut merupakan pihak berelasi satu dengan yang lainnya.

PENGUNGKAPAN

Seluruh Entitas

13. Hubungan antara entitas induk dan entitas anak diungkapkan terlepas dari apakah telah terjadi transaksi antara mereka.

14. Untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak dari hubungan pihak berelasi pada suatu entitas, maka sangat tepat untuk mengungkapkan hubungan dengan pihak-pihak berelasi ketika pengendalian itu ada, terlepas apakah telah terjadi transaksi antara pihak-pihak berelasi.

15. Persyaratan untuk mengungkapkan hubungan pihak berelasi antara satu entitas induk dan entitas anaknya merupakan tambahan atas persyaratan pengungkapan dalam PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri dan PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain.

16. Dikosongkan.

17. Entitas mengungkapkan kompensasi personil manajemen kunci secara total dan untuk masing-masing kategori berikut:

- (a) imbalan kerja jangka pendek;
- (b) imbalan pascakerja;
- (c) imbalan kerja jangka panjang lainnya;
- (d) pesangon; dan
- (e) pembayaran berbasis saham.

17A. Jika entitas memperoleh jasa personil manajemen kunci dari entitas lain ("entitas manajemen"), maka entitas tidak disyaratkan untuk menerapkan persyaratan dalam paragraf 17 atas imbalan yang dibayarkan atau terutang oleh entitas manajemen kepada pekerja atau direktur entitas manajemen.

18. Jika entitas memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi selama periode yang dicakup dalam laporan keuangan, maka entitas mengungkapkan sifat dari hubungan dengan pihak-pihak berelasi serta informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, yang diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam

laporan keuangan. Persyaratan pengungkapan ini merupakan tambahan persyaratan di paragraf 17. Sekurang-kurangnya, pengungkapan meliputi:

- (a) jumlah transaksi;
- (b) jumlah saldo, termasuk komitmen, dan:
 - (i) syarat dan ketentuannya, termasuk apakah terdapat jaminan, dan sifat imbalan yang akan diberikan, dalam penyelesaian; dan
 - (ii) rincian jaminan yang diberikan atau diterima;
- (c) penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut; dan
- (d) beban yang diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang dari pihak-pihak berelasi.

18A. Jumlah yang dibayarkan oleh entitas untuk penyediaan jasa personil manajemen kunci yang disediakan oleh entitas manajemen yang terpisah diungkapkan.

19. Pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 18 dilakukan secara terpisah untuk masing-masing kategori berikut:

- (a) entitas induk;
- (b) entitas dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan terhadap entitas;
- (c) entitas anak;
- (d) entitas asosiasi;
- (e) ventura bersama dimana entitas merupakan venturer bersama (joint venturer);
- (f) personil manajemen kunci dari entitas atau entitas induknya; dan
- (g) pihak-pihak berelasi lainnya.

20. Klasifikasi jumlah yang terutang dari, dan tagihan kepada, pihak-pihak berelasi dalam berbagai kategori seperti yang disyaratkan di paragraf 19 merupakan perluasan dari persyaratan pengungkapan dalam PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* untuk informasi yang akan disajikan baik dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Kategori tersebut diperluas untuk menyediakan analisis yang lebih komprehensif atas saldo dari pihak berelasi dan berlaku untuk transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

21. Berikut ini adalah contoh transaksi yang diungkapkan jika dilakukan dengan pihak berelasi:

- (a) pembelian atau penjualan barang (barang jadi atau setengah jadi);
- (b) pembelian atau penjualan properti dan aset lain;
- (c) penyediaan atau penerimaan jasa;
- (d) sewa;
- (e) pengalihan riset dan pengembangan;
- (f) pengalihan di bawah perjanjian lisensi;
- (g) pengalihan di bawah perjanjian pembiayaan (termasuk pinjaman dan kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai atau natura);
- (h) provisi atas jaminan atau agunan; dan
- (i) komitmen untuk melakukan sesuatu jika peristiwa khusus terjadi atau tidak terjadi di masa depan, termasuk kontrak eksekutori¹ (diakui atau tidak diakui); dan
- (j) penyelesaian liabilitas atas nama entitas atau pihak berelasi.

22. Partisipasi oleh entitas induk atau entitas anak dalam program imbalan pasti yang membagi risiko antar entitas dalam kelompok usaha adalah suatu transaksi antara pihak berelasi (lihat PSAK 24: *Imbalan Kerja* paragraf 42).

23. Pengungkapan bahwa transaksi pihak-pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar dapat dilakukan hanya jika hal tersebut dapat dibuktikan.

24. *Pos yang memiliki sifat yang serupa dapat diungkapkan secara gabungan kecuali ketika pengungkapan terpisah diperlukan untuk memahami dampak transaksi pihak-pihak berelasi terhadap laporan keuangan entitas.*

Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah

25. Entitas pelapor dikecualikan dari persyaratan pengungkapan di paragraf 18 atas transaksi dengan pihak-pihak berelasi dan saldo, termasuk komitmen dengan:

- (a) pemerintah yang memiliki pengendalian, atau pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan, atas entitas pelapor; dan
- (b) entitas lain yang merupakan pihak berelasi karena dikendalikan atau dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah yang sama atas entitas pelapor dan entitas lain tersebut.

26. Jika entitas pelapor menerapkan pengecualian di paragraf 25, maka entitas mengungkapkan mengenai transaksi dan saldo terkait yang dirujuk paragraf 25, yaitu:

- (a) nama departemen atau instansi pemerintah dan sifat hubungannya dengan entitas pelapor (yaitu, pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan);
- (b) informasi berikut dengan rincian yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak transaksi dengan pihak-pihak berelasi terhadap laporan keuangan:
 - (i) sifat dan jumlah setiap transaksi yang secara individual signifikan; dan
 - (ii) untuk transaksi lainnya yang secara kolektif, tetapi tidak secara individu, signifikan, indikasi secara kualitatif atau kuantitatif atas luasnya transaksi tersebut. Jenis transaksi tersebut termasuk yang dijelaskan di paragraf 21.

27. Dalam menggunakan pertimbangan untuk menentukan seberapa rinci pengungkapan yang disyaratkan sesuai dengan paragraf 26(b), entitas pelapor mempertimbangkan kedekatan hubungan pihak-pihak berelasi dan faktor lain yang relevan dalam menentukan tingkat signifikansi suatu transaksi, seperti:

- (a) ukuran yang signifikan;
- (b) dilakukan di luar ketentuan pasar;
- (c) di luar operasi bisnis sehari-hari yang normal, seperti sebagai pembelian dan penjualan suatu bisnis usaha;
- (d) diungkapkan kepada regulator atau otoritas pengawas;
- (e) dilaporkan kepada manajemen senior;
- (f) bergantung pada persetujuan pemegang saham.

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

28. Entitas menerapkan Permutasi...

Lampiran 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,19844022
Most Extreme Differences	Absolute	,097
	Positive	,071
	Negative	-,097
Test Statistic		,097
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,479	,064		7,539	,000		
	Struktur_Kepemilikan	-,001	,001	-,073	-,511	,612	,922	1,085
	Ukuran_KAP	,104	,059	,251	1,755	,085	,922	1,085

a. Dependent Variable: Transaksi_Pihak_Berelasi

Lampiran 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5,000	,831		-6,014	,000
	Struktur_Kepemilikan	,018	,019	,131	,915	,365
	Ukuran_KAP	-1,108	,775	-,205	-1,430	,159

a. Dependent Variable: LnUi2

Lampiran 7. Hasil Uji Linearitas

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,252 ^a	,064	,025	,19400

a. Predictors: (Constant), X2_2, X1_2

Lampiran 8. Hasil Uji Hipotesis

Variables Entered/Removed ^a			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Ukuran_KAP, Struktur_Kepemi Ikan ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Transaksi_Pihak_Berelasi

b. All requested variables entered.

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,280 ^a	,078	,041	,202450

a. Predictors: (Constant), Ukuran_KAP, Struktur_Kepemilikan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,171	2	,085	2,085	,135 ^b
	Residual	2,008	49	,041		
	Total	2,179	51			

a. Dependent Variable: Transaksi_Pihak_Berelasi

b. Predictors: (Constant), Ukuran_KAP, Struktur_Kepemilikan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,479	,064		7,539	,000
	Struktur_Kepemilikan	-,001	,001	-,073	-,511	,612
	Ukuran_KAP	,104	,059	,251	1,755	,085

a. Dependent Variable: Transaksi_Pihak_Berelasi